

Pengaruh Ideologi Partai Politik Dan Nilai – Nilai Kepribadian Anggota Terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pendidikan Di DPRD Kota Surabaya

Pengaruh Ideologi Partai Politik dan Nilai – Nilai Kepribadian Anggota Terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pendidikan di DPRD Kota Surabaya

Doni Andhika Kusuma

Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya
Doniandika34@gmail.com

Supriyanto

Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya
supriyanto@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ideologi partai politik dan nilai – nilai kepribadian terhadap proses pengambilan kebijakan pendidikan di DPRD Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data di uji menggunakan uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas, uji linieritas, uji multikolonieritas dan menggunakan teknik analisis data regresi ganda, analisis uji T (pengaruh secara parsial) dan uji F (pengaruh secara simultan) dan penghitungan data di bantu dengan program SPSS 21.0.

Berdasarkan hasil analisis data pada uji T variabel ideologi politik secara parsial berpengaruh terhadap variabel proses pengambilan kebijakan pendidikan sebesar 0,000, serta variabel nilai – nilai kepribadian secara parsial berpengaruh terhadap variabel proses pengambilan kebijakan pendidikan sebesar 0,026. Nilai signifikan variabel ideologi partai politik dan nilai – nilai kepribadian terhadap proses pengambilan kebijakan pendidikan yang diperoleh adalah sebesar 0,000. Nilai signifikan ini lebih kecil dari nilai alpha yaitu 0,05 dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima, artinya ideologi partai politik dan nilai – nilai kepribadian secara bersama-sama berpengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan pendidikan di DPRD Kota Surabaya. Adapun besarnya pengaruh ideologi partai politik dan nilai – nilai kepribadian terhadap proses pengambilan kebijakan pendidikan yaitu sebesar 54.1%.

Kata Kunci : *ideologi partai politik, nilai – nilai kepribadian, pengambilan kebijakan pendidikan, dewan legislatif, ideologi*

Abstract

This research was conducted to examine the influence of political party ideology and personality values on the educational policy making process in the Surabaya City legislative council. This research uses quantitative methods. The data was tested using the analysis requirements test, namely the normality test, linearity test, multicollinearity test and using multiple regression data analysis techniques, analysis of the T test (partial effect) and F test (simultaneous effect) and the calculation of data assisted with the SPSS 21.0 program.

Based on the results of data analysis on the T test the political ideology variable partially influences the educational policy making variable by 0,000, and the personality values variable partially influences the education policy making variable by 0.026. in the F test shows the value of Fcount of 24.147. The significant value of the political party ideology variable and the personality values of the educational policy making process obtained was 0,000. This significant value is smaller than the alpha value of 0.05, so H0 is rejected and H1 is accepted, meaning that the ideology of political parties and personality values together influence the educational policy making process in the Surabaya City legislative council. The magnitude of the influence of political party ideology and personality values on the educational policy making process that is equal to 54.1%.

keywords: *political party ideology, personality values, education policy making, legislative council, ideology*

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara demokrasi yang sangat baik dalam proses demokrasinya. Dari demokrasi tersebut tidak terlepas oleh peran partai politik yang beragam ideologinya namun tetap dalam satu lingkup tujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini partai memiliki peran penting sebagai jembatan pemikiran antara rakyat dan pemerintah. Partai politik dapat sebagai lembaga proyeksi dari gagasan-gagasan,

pandangan dan keyakinan dalam masyarakat demokratis. (Thomas, 2012 : 27-30) Sebuah kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah harusnya melibatkan para aktor pengambil kebijakan. Para aktor pengambil kebijakan dibagi dalam dua kategori, (1) *Official Policy Maker* yaitu aktor yang secara resmi berada di lembaga pemerintahan resmi seperti anggota eksekutif, legislatif, administrator dan hakim pengadilan. (2) *Unofficial Participants* yaitu para aktor yang tidak mempunyai kewenangan apapun di lembaga resmi tetapi kegiatannya

sangat mempengaruhi *Official Policy Maker*. Kelompok ini bisa disebut kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan (*interest groups*) seperti, partai politik, media massa dan warga negara secara individual yang dimana suaranya sangat diperhatikan oleh *Official Policy Maker*

Sistem desentralisasi pendidikan merupakan wujud dari implementasi kebijakan pemerintah maka diterapkanlah Manajemen Berbasis Sekolah. dengan sistem MBS ini maka sekolah yang sebelumnya di kelola oleh pemerintah pusat dialihkan pengelolanya kepada pemerintah kota atau kabupaten dan provinsi. Dampak dari MBS ini kebijakan pendidikan di kota, kabupaten, atau provinsi yang di beri akses desentralisasi pendidikan menjadi lebih leluasa berinovasi, sehingga mutu pendidikan dapat ditingkatkan. Sekolah juga memiliki hak otonomi yang lebih besar untuk mengelola mutu dan merupakan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, sebagai sarana efisiensi pendidikan.

Pada umumnya masyarakat hanya mengetahui untuk suatu kebijakan hanya disahkan oleh pemerintah, namun ada lembaga lain selain pemerintah sebagai lembaga eksekutif untuk pembuatan kebijakan. Lembaga resmi pemerintahan selain lembaga eksekutif yang bisa membuat kebijakan adalah lembaga legislatif atau biasa dikenal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada proses pembuatan kebijakan pendidikan, akan terjadi tarik menarik wacana antar anggota parlemen untuk mewujudkan kepentingannya sendiri ataupun kelompok. Dalam hal ini lembaga legislatif juga mempunyai peran dalam perumusan kebijakan pendidikan dan setiap kebijakan yang dibuat di lembaga legislatif ataupun DPRD dipengaruhi oleh partai yang memiliki anggota mayoritas di parlemen dan kebijakan yang dihasilkan akan mencerminkan ideologi dan perspektif partai yang dominan

Dalam pengambilan kebijakan pendidikan di lembaga pemerintahan khususnya DPRD Kota Surabaya, setiap anggota dewan akan merapatkan terlebih dahulu dengan fraksi masing-masing partai agar kebijakan tersebut sesuai dengan ideologi partai dan visi misipartai. Adapun masing-masing fraksi anggota partai politik tidak memikirkan kepentingan partai tetapi mementingkan kondisi masyarakat. Dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat DPRD Kota Surabaya ideologi partai politik sangat berpengaruh terhadap disetujuinya kebijakan tersebut secara cepat atau harus ditunda ataupun bahkan harus diganti. nilai nilai kepribadian anggota dewan juga mempengaruhi pengambilan kebijakan untuk dapat dilihat seberapa bagus kualitas kebijakan yang diambil.

Pada pelaksanaan proses pengambilan kebijakan mempunyai tahapan tahapan yang sangat kompleks karena melibatkan pihak-pihak dengan berbagai kepentingan masing-masing bisa dari kepentingan partai

politik background dari aktor kebijakan sampai kepentingan individu aktor kebijakan sendiri dan bisa bertambah ketika kebijakan tidak dirumuskan secara jelas karena konsolidasi politik yang mewarnai proses pengambilan kebijakan

Anggota DPRD Kota Surabaya termasuk aktor yang berperan dalam pengambilan kebijakan. Pengambilan kebijakan juga ditentukan dari seberapa baik kualitas setiap anggota DPRD Kota Surabaya dari masing-masing Partai politik yang mengisi jabatan di DPRD Kota Surabaya. Setiang anggota dewan mempunyai nilai-nilai kepribadian yang berbeda dalam memandang kebijakan yang akan diambil. Nilai-nilai kepribadian sendiri berperan sebagai keyakinan yang dimiliki setiap individu untuk berperilaku dan tujuan akhir yang diinginkan individu dapat digunakan sebagai standart dalam hidupnya.

Nilai kepribadian atau dengan nama lain nilai individu dibagi menjadi tiga yaitu *self values* adalah nilai nilai yang hanya berdampak pada seseorang, *self centered* adalah nilai yang tidak berdampak pada orang lain, *social values* yaitu nilai kepribadian yang mempunyai dampak bagi orang orang yang ada diketirnya. Menurut Jung dalam Alwisol (39-49:2009), struktur kepribadian adalah suatu gabungan yang berisi pemikiran, tingkah laku yang disadari ataupun tidak disadari yang berinteraksi satu sama lain, dan perasaan. Struktur *psyche* menurut Jung terdiri dari (1) *Ego* (2) *Personal Unconsciou* (3) *Collective Unconscious*

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah kebanyakan disetujui oleh partai politik yang memiliki jumlah kursi kepemimpinan pemerintah terbanyak ataupun koalisi dengan maksud agar kebijakan tersebut bisa disetujui dan sesuai dengan tujuan partai politik yang dimana itu dinilai bisa merugikan masyarakat ataupun menguntungkan masyarakat dan bahkan bisa saja hanya menguntungkan kepentingan partai politik yang berkuasa agar tujuan partai politik lebih mudah tercapai.

Fauzi (2017) menjelaskan terdapat 4 partai dengan 4 ideologi politik yang berbeda. Kepribadian dan ideologi politik memiliki pengaruh terhadap pengambilan kebijakan dimana anggota partai politik yang tergabung di dalam partai kebanyakan mempunyai pemikiran dan ciri khas yang sama yang mencerminkan partai tersebut.

Partai dengan ideologi Islam Tradisional karakteristiknya adalah (1). Kebangsaan, nasionalis dan sekuler, adalah tata kehidupan yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. (2). Kepatuhan rakyat terhadap pemimpin, (3). Orang yang memahami agama islam tradisional secara luas yang memperoleh gelar kiyai harus sebagai pemimpin, (4). Dalam politik empiris lebih berazaskan pancasila

Islam Modern Ideologi politik partai ini menjadikan agama islam sebagai dasarnya, data yang diperoleh, memiliki karakteristik sebagai berikut: (1). Ajaran islam sebagai dasar pemikiran dan tindakan politik, (2). Menyelenggarakan pemikiran islam secara menyeluruh, (3). Merendahkan bentuk idiologi ataupun pemikiran lain yang memisahkan ajaran agama dengan kehidupan bermasyarakat bernegara, (4). Menurut mereka, memimpin yang baik adalah yang beragama islam, (5). Dalam politik empiris, politik mereka merujuk pada syaria Islam dan menolak sekulerisme.

Nasionalis Dari pandangan-pandangan yang diungkapkan oleh subjek terpilih kelompok nasionalis, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristiknya adalah: (1). Adanya pandangan yang berpendapat kaum nasionalis adalah yang peduli terhadap masyarakat rendah sosial ekonomi, (2). Ada kecenderungan pandangan bahwa orang-orang Nasionalis yang berjuang untuk tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa, (3). Agama dan negara, adalah hal yang berbeda dan tidak dapat dipersatukan. Dalam politik empiris, mereka mempertahankan dan mendukung sekularisme, (4). Pemimpin adalah satu satunya orang yang mempunyai kewenangan dalam segala hal dan harus mematuhi pemimpin, (5). Penataan masyarakat dan negara menggunakan pola sentralistis atau terpimpin.

Sosial Demokrat Dalam pandangan umum, mempunyai karakteristik sebagai berikut: (1). Menganggap pemikiran mereka yang paling benar dan merendahkan pemikiran idiologi lain, (2). Menganggap partai mereka sebagai partai yang benar benar membela masyarakat terutama buruh, (3). Cenderung menolak segala bentuk kerjasama dengan kelompok politik lainnya, terutama partai politik yang berkuasa, dan cenderung menjadi partai oposisi, (4). Cenderung menolak pengaruh agama dalam tata masyarakat dan juga negara.

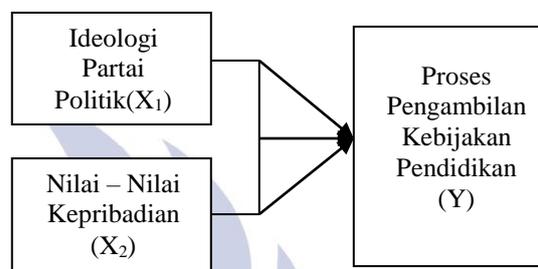
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “Pengaruh Idiologi Partai Politik Dan Nilai – Nilai Kepribadian Anggota Terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pendidikan Di DPRD Kota Surabaya”. Harapannya hasil penelitian ini bisa menjadi masukan dan saran bagi lembaga Pemerintahan dan DPRD Kota Surabaya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain menggunakan rancangan penelitian ex post facto yang biasa disebut dengan penelitian kasual komparatif, karena penelitian ini berusaha mencari informasi tentang hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa. Hal ini sejalan dengan pendapat Subali (2008:8) yang menyampaikan bahwa penelitian ex post facto merupakan penelitian dengan cara

mencari akibat lanjut dari peristiwa yang terjadi. Sugiyono (2014:10) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti lebih bersifat sebab akibat (kasual), sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Sealaras dengan pendapat tersebut peneliti ini memiliki variabel independen dan dependen dimana ideologi partai politik dan nilai nilai kepribadian sebagai variabel independen dihipotesiskan berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan sebagai variabel dependen.

Gambaran untuk rancangan penelitian sebagai berikut



Gambar 1. Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini, populasi berjumlah 50 anggota DPRD Kota Surabaya menjabat periode tahun 2019 – 2024. Setelah diketahui jumlah populasi, peneliti kemudian menentukan jumlah sampel dengan menggunakan rumus dari perhitungan dari isaac dan michael (Sugiyono 2016:128) dengan tingkat kesalahan 5% maka jumlah sampel sebanyak 44 sampel.

Teknik atau metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua data yaitu data primer yang diperoleh dari penyebaran angket atau kuesioner dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi dengan menggunakan skala likert. Uji validitas instrumen menggunakan rumus korelasi product moment sedangkan uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus alpha cronbach.

Hasil uji validitas menggunakan program SPSS 21.0 for Windows menunjukkan 20 butir item pernyataan dari variabel ideologi partai terdapat 2 butir item pernyataan yang tidak valid dan 18 butir item pernyataan yang valid, sedangkan pada variabel nilai – nilai kepribadian terdapat 16 butir item pernyataan dan 3 butir diantaranya yang tidak valid dan 13 butir item pernyataan yang valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa kedua variabel reliabel, sehingga item yang valid dan reliabel dapat digunakan sebagai penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi ganda. Sebelum menghitung regresi ganda terdapat beberapa persyaratan dalam analisis data yang harus dipenuhi antara lain, uji normalitas dan uji linieritas, untuk analisis regresi ganda, analisis uji T (pengaruh secara parsial) dan analisis uji F (pengaruh secara simultan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Ideologi Partai Politik Terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pendidikan di DPRD Kota Surabaya

Penelitian yang dilakukan memperoleh hipotesis yakni ideologi partai politik berpengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan pendidikan di DPRD Kota Surabaya. Hasil pengujian linieritas diketahui bahwa hasil penghitungan taraf signifikansi untuk variabel ideologi partai politik dan proses pengambilan kebijakan pendidikan adalah 0,825 yang artinya (deviation from linearity) adalah $0,825 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan kedua variabel mempunyai hubungan yang linier. Nilai 0,878 (X_1) merupakan koefisien regresi yang menunjukkan bahwa jika nilai variabel ideologi partai politik (X_1) ditingkatkan sebesar satu satuan akan menyebabkan peningkatan nilai dari variabel terikat yaitu proses pengambilan kebijakan pendidikan (Y) sebesar 0,878 satuan.

Hasil uji parsial (Uji T) pengaruh ideologi partai politik (X_1) dan nilai – nilai kepribadian (X_2) terhadap proses pengambilan kebijakan pendidikan (Y), maka berdasarkan hasil perhitungan koefisien regresi ganda dengan uji t diperoleh Thitung sebesar 5,947. Nilai Thitung ini lebih besar dari Ttabel yakni sebesar 2,018. Sedangkan nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar 0,000. Nilai signifikan ini lebih kecil dari nilai alpha 0,05 dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya ideologi partai politik berpengaruh secara signifikan terhadap proses pengambilan kebijakan pendidikan di DPRD Kota Surabaya. Hal tersebut dapat diketahui nilai signifikan (sig) ideologi partai politik (X_1) yaitu 0,000 yang lebih kecil dari nilai alpha 0,05 yang artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima, dari hasil tersebut dinyatakan bahwa ideologi partai berpengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan pendidikan dan dapat dilihat dari tanggapan responden yang memberikan nilai positif pada jawaban dalam instrumen.

Berdasarkan perhitungan, maka hasil penelitian tentang pengaruh ideologi partai politik sejalan dengan teori Rodee (2013) yang mengatakan ideologi politik berfungsi untuk memberikan dasar legitimasi pada pemerintah, menjadi dasar untuk menentang *status quo*, mempersatukan rakyat, pedoman untuk memilih kebijakan dan perilaku politik, prinsip perjuangan yang menjadi alat komunikasi antara pemimpin dan massa. Dimana menurut Rodee dalam hal memilih kebijakan dan perilaku politik yang dianut oleh setiap pemangku kebijakan akan sesuai ataupun hampir mirip seperti pedoman ideologi yang di anu

Penelitian ini juga sejalan dengan Fauzi (2017) seperti partai ber-ideologi nasionalis religius lebih mementingkan

pemikiran nasionalisme, humanisme, dan pluralisme dikalangan masyarakat. Islam tradisional lebih mementingkan kebijakan yang berlandaskan adat islam dan tuntunan Nabi Muhammad. Islam modern lebih berfikir terhadap ilmu agama yang dinamis yang bisa dipadukan di era modern. Sosial demokrat lebih berfikir kebijakan pendidikan yang diambil harus sesuai ditujukan kepada kesejahteraan, keadilan, persatuan yang merata untuk seluruh kalangan masyarakat Sesuai pernyataan bahwa ideologi partai politik adalah faktor besar maupun salah satu faktor yang menentukan aktor kebijakan dalam proses pengambilan kebijakan pendidikan di DPRD Kota Surabaya.

Berdasarkan penjabaran dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan teori yang sudah ada. ideologi partai politik adalah faktor besar maupun salah satu faktor yang menentukan aktor kebijakan dalam proses pengambilan kebijakan pendidikan dan juga dapat mempengaruhi pemikiran dan langkah yang akan di ambil oleh aktor kebijakan dalam proses pengambilan kebijakan pendidikan.

B. Pengaruh Nilai – Nilai Kepribadian Anggota Terhadap Pengambilan Kebijakan Pendidikan di DPRD Kota Surabaya

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan hipotesis kedua yakni nilai – nilai kepribadian berpengaruh positif dan signifikan terhadap proses pengambilan kebijakan pendidikan di DPRD Kota Surabaya. Berdasarkan pengujian linieritas, hasil perhitungan taraf signifikan untuk variabel nilai – nilai kepribadian proses pengambilan kebijakan pendidikan adalah 0,801 yang artinya (deviation from linearity) adalah $0,801 > 0,05$, Nilai 0,845 (X_2) merupakan koefisien regresi yang menunjukkan bahwa jika nilai variabel nilai – nilai kepribadian (X_2) ditingkatkan sebesar satu satuan akan menyebabkan peningkatan nilai dari variabel terikat yaitu proses pengambilan kebijakan (Y) sebesar 0,801 satuan. sehingga dapat disimpulkan kedua variabel mempunyai hubungan yang linier. Variabel nilai – nilai kepribadian (X_2) terhadap proses pengambilan kebijakan pendidikan (Y) berdasarkan hasil Uji t diperoleh sebesar 2,314 dan taraf signifikansi (sig) 0,026. Hal ini berarti Thitung $>$ Ttabel sebesar 2,018 dan nilai signifikansi ini lebih kecil dari pada nilai alpha 0,05 ($\alpha = 5\%$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai – nilai kepribadian secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap proses pengambilan kebijakan pendidikan sehingga hipotesis kedua teruji kebenarannya. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian variabel nilai – nilai kepribadian (X_2) dengan diperoleh dari 44 responden yang dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menganggap nilai – nilai kepribadian sangat berpengaruh karena responden

cenderung memilih nilai angka 3 dan 4 dengan jumlah 84,76% dan variabel pengambilan kebijakan pendidikan 99,9% yang artinya setiap responden dalam hal mengambil kebijakan pendidikan berdasarkan nilai – nilai kepribadian yang responden miliki. Dari keseluruhan yang memilih skor 3 dan 4, adapula yang memilih skor 1 sebanyak 0% dan skor 2 sebanyak 15,24%.

Berdasarkan hasil penelitian Nilai – Nilai Kepribadian yang dimiliki setiap anggota legislatif DPRD Kota Surabaya sejalan oleh teori dari Freud (Minderop, 2013 : 21) dimana setiap anggota mempunyai kepribadian *Id*, *Ego*, *Super Ego* dalam suatu proses kepemimpinan dalam DPRD Kota Surabaya dan dalam penelitian ini berkonteks pada pengambilan kebijakan pendidikan dan nilai – nilai kepribadian ini sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan pendidikan karena pada proses pengambilan kebijakan pendidikan di DPRD Kota Surabaya setiap anggota legislatif akan menyampaikan pendapat dan pandangan masing masing tentang kebijakan pendidikan dan akan terjadi perselisihan wacana ataupun tarik menarik pendapat dari setiap anggota karena mereka mempunyai pemikiran dan kepribadian yang berbeda bagi setiap orang.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari Supriyanto (2018) yang berjudul “Dinamika Politik Pengambilan Kebijakan Pembentukan Dua Dinas Pendidikan Di Kabupaten Bantul” dimana penelitian ini mempunyai hasil dari penyebab pembentukan dua dinas pendidikan di kabupaten bantul karena permintaan dari pihak eksternal pemerintahan, dalam hal ini yaitu organisasi berbasis massa Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah yang mendukung Bupati terpilih Kabupaten Bantul dan meminta jabatan sebagai kepala dinas pendidikan, pada penelitian tersebut menampilkan nilai kepribadian yang sesuai dengan teori dari Freud (Minderop, 2013 : 21) yang menjelaskan nilai Ego, dan Super Ego dimana Ego dalam hal ini adalah kebijakan politik yang dibuat oleh Bupati Bantul untuk pembentukan dua dinas pendidikan karena menuruti permintaan dari dua ormas besar yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah karena jika Bupati Bantul tidak menyediakan jabatan tersebut bagi dua ormas tersebut maka salah satu ormas yang tidak memperoleh jabatan akan menarik suara massa di pilkada selanjutnya dan tidak mendukung Bupati tersebut. Super Ego dalam hal ini Bupati Bantul mengetahui efek negatif ataupun dampak negatif yang ditimbulkan yaitu terserapnya anggaran dana yang besar hanya untuk operasional kedua dinas tersebut ataupun tidak efektifnya birokrasi tetapi tetap dibuat kebijakan pembentukan tersebut demi memperoleh suara di pilkada periode selanjutnya.

Berdasarkan penjabaran dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan teori yang sudah ada. Nilai – nilai kepribadian yang ada di anggota DPRD Kota Surabaya dapat berpengaruh pada pengambilan kebijakan pendidikan di kota Surabaya.

C. Pengaruh Ideologi Partai Politik Dan Nilai – Nilai Kepribadian Anggota Terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pendidikan Di DPRD Kota Surabaya

Penelitian ini dilakukan di DPRD Kota Surabaya yang menghasilkan hipotesis, yakni ideologi partai politik dan nilai – nilai kepribadian berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan pendidikan. Hasil uji prasyarat analisis data dari uji normalitas regresi dalam penelitian ini memiliki tingkat probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200 Hal tersebut menunjukkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal. Hasil uji hipotesis tersebut didasarkan pada kriteria pengujian dengan tingkat signifikan (α) = 0,05 ditentukan sebagai berikut : (a) Apabila $T_{hitung} > T_{tabel}$, Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. (b) Apabila $T_{hitung} < T_{tabel}$, Maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berdasarkan hasil hitung statistik melalui SPSS 21.0 dapat diketahui bahwa Uji F sebesar 24.147 dan taraf signifikansi (sig) 0,000. Hal ini berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar 3,23 dan nilai signifikansi ini lebih kecil dari pada nilai alpha 0,05 (α = 5%). Hal ini juga diperkuat dari hasil koefisien determinasi yang diperoleh koefisien korelasi (R) sebesar 0,735 dan koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,541. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara ideologi partai politik (X_1) dan nilai – nilai kepribadian (X_2) yang secara bersama-sama berpengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan pendidikan (Y) di DPRD Kota Surabaya dan variabel tersebut bersama-sama berkontribusi lebih besar terhadap prestasi belajar siswa yakni sebesar 54,1%. Hal ini didasarkan pada hasil angket yang disebar kepada 44 responden, yang menjelaskan sebagian besar responden menjawab skor 3 dan 4 pada ketiga variabel. Pada variabel ideologi partai politik (X_1) sejumlah 92,4 %, variabel nilai – nilai kepribadian (X_2) sejumlah 84,76 % dan variabel pengambilan kebijakan pendidikan (Y) sejumlah 99,9 % yang artinya bahwa ideologi partai politik dan nilai – nilai kepribadian mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anggota legislatif DPRD Kota Surabaya dalam pengambilan kebijakan pendidikan.

Teori Fauzi (2017) menyatakan bahwa aktor pemerintahan ataupun aktor kebijakan dalam pengambilan kebijakan dalam hal ini pengambilan kebijakan pendidikan akan tetap memandang ideologi partai yang di anut apakah bertentangan atau tidak.

Penelitian ini juga diperkuat dengan penelitian sebelumnya oleh Niklas Potrafke (2017) yang berjudul *“Government Ideology and Economic Policy-making In The United States”*, dan Idha Rahayuningsih (2018) berjudul *“Perananan Personal Values Pemimpin Dalam Pengambilan Keputusan Organisasi”*. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian pertama membahas perihal pengaruh ideologi partai politik pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Sedangkan perbedaannya teknik analisis data yang digunakan dan subjek penelitian sebelumnya dilakukan di Amerika Serikat sedangkan penelitian ini di DPRD kota Surabaya Indonesia. Penelitian kedua membahas perihal pengaruh nilai kepribadian pemimpin organisasi dalam pengambilan keputusan. Sedangkan perbedaannya teknik analisis data dan subjek penelitian sebelumnya di organisasi masa atau perusahaan sedangkan penelitian ini di DPRD Kota Surabaya. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan hasil yang sama yaitu ideologi partai politik dan nilai – nilai kepribadian berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan pendidikan

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan teori yang sudah ada. Ideologi partai politik dan nilai – nilai kepribadian di DPRD Kota Surabaya dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan pendidikan. Kedua variabel tersebut memberikan kontribusi yang positif terhadap pengambilan kebijakan pendidikan, bekerja dalam lingkungan pemerintahan Legislatif dimana komunikasi politik ataupun hal yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan tidak luput dari pengaruh ideologi partai politik dan nilai – nilai kepribadian setiap anggota DPRD Kota Surabaya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh pada variabel ideologi partai politik (X_1) nilai T_{hitung} sebesar 5,947. Nilai signifikan variabel ideologi partai politik terhadap pengambilan kebijakan pendidikan sebesar 0,000 nilai tersebut lebih kecil dari nilai alpha 0,05 dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima, ideologi partai politik berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan kebijakan pendidikan di DPRD Kota Surabaya.
2. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh pada variabel nilai – nilai kepribadian (X_2) nilai T_{hitung} sebesar 2,314. Nilai signifikan variabel

nilai – nilai kepribadian terhadap pengambilan kebijakan pendidikan sebesar 0,026 nilai tersebut lebih kecil dari nilai alpha 0,05 dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya nilai – nilai kepribadian berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan kebijakan pendidikan di DPRD Kota Surabaya.

3. Berdasarkan hasil data pada uji F menunjukkan nilai Fhitung sebesar 24,147. Nilai signifikan variabel ideologi partai politik dan nilai – nilai kepribadian terhadap pengambilan kebijakan pendidikan yang diperoleh adalah sebesar 0,000. Nilai signifikan ini lebih kecil dari nilai alpha yaitu 0,05 dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya ideologi partai politik dan nilai – nilai kepribadian secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan pendidikan di DPRD Kota Surabaya. Adapun besarnya pengaruh ideologi partai politik dan nilai – nilai kepribadian terhadap pengambilan kebijakan pendidikan dilihat dari nilai R Square yaitu sebesar 54,1%.

Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan, maka saran diberikan kepada pihak-pihak terkait yakni:

1. Aktor kebijakan di DPRD Kota Surabaya juga tetap mempertahankan konsistensi pada kebijakan apapun yang dibuat dimana harus mengarah pada kepentingan masyarakat Kota Surabaya agar keadilan dalam proses pemerataan wajib belajar 12 tahun terpenuhi dan bisa di rasakan manfaatnya terlebih bagi masyarakat taraf ekonomi rendah.
2. Peneliti lain, diharapkan untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan pendidikan dan menambah variabel bebas lainnya sehingga dapat mengetahui faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kebijakan pendidikan.
3. Untuk partai politik diharapkan pada proses kaderisasi lebih menanamkan ideologi partai yang di anut agar anggota partai lebih mengenal ideologi yang di miliki dikarenakan nilai kepribadian anggota partai juga mempunyai dampak yang besar bagi keberlangsungan anggota partai yang berada di parlemen.

DAFTAR PUSTAKA

Alwisol. 2009. *Psikologi kepribadian*. Malang : UMM Press Hal 39 - 49

Blese, Elsie Fobissie. 2018. The Effects Of Environmental Values And Political Ideology On Public Support For Renewable Energy Policy In Ottawa, Canada. *Journal of arts in sociology. Master of Arts in Sociology*. Vol. 2, No. 01.

Budiardjo. Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama

Fauzie, Akhmad. Dan Machrus, Hawaim. 2017. Kepribadian Otoritarian Dan Ideologi Politik (Studi Kualitatif Terhadap Fungsionaris Dan Simpatisan Empat Partai Politik Di Surabaya). *Jurnal Penelitian Psikologi*. Vol. 1, No. 01.

Feith, H., & Castle, L. (ed). (1988). *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES

Jalajas. David S dan Pullaro, Ray . 2017. The Effect of Personality on Decision Making. *journal of Northeast Business & Economics Association Annual Conference*. Vol. 1, No. 02

Rodee, Carlton C. 2013. *Pengantar Ilmu Politik*. Dippt OCW. Vol.1, No.1

Supriyanto. 2013. Dinamika Politik Pengambilan Kebijakan Pembentukan Dua Dinas Pendidikan Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Penelitian Humaniora*. Vol. 18, No 2 : 131- 144

UNESA. 2020. *Pedoman Penulisan Artikel Jurnal*, Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Surabaya.

Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

